



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Tim Evaluasi yang Bakal Dievaluasi

KGUPP membantah tuduhan Dewan bahwa mereka memperlambat kerja pemerintah DKI.

Inge Klara Safitri

inge.klara@tempo.co.id

JAKARTA — Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) membuka diri untuk dievaluasi. "Evaluasi saja secara menyeluruh, agar tidak saling tuding. Jadi jelas siapa saja yang menghambat dan apa saja hambatannya," kata Nursyahbani Katjasungkana kepada *Tempo*, kemarin.

Mantan komisioner Komisi Nasional Perempuan itu merupakan satu dari 73 anggota Tim Gubernur. Dari lima bidang, dia bekerja di bagian pencegahan korupsi.

Nursyahbani mengatakan fungsi Tim Gubernur adalah memberi saran agar program prioritas gubernur cepat terlaksana dan berdampak maksimal. Saran itu mereka sampaikan setelah menginvestigasi serangkaian laporan. Anjuran, dia menambahkan, bisa berupa tindakan atau *policy advice*.

Nursyahbani mengakui kekurangan Tim Gubernur. Mereka gagal mensosialisasi capaian mereka, yaitu memastikan terlaksananya kegiatan strategis yang merupakan janji politik Anies Baswedan. "Atau walaupun sudah disampaikan, tertutup oleh ramai respons netizen yang cenderung menilai tanpa klarifikasi," ujar putri Katjasungkana, inisiator Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, itu.

Tim Gubernur, dia menambahkan, juga rutin melaporkan kerja mereka. "Setiap tanggal empat, kalau enggak ada laporan, honor enggak keluar, he-he-he," kata dia.

Alih-alih menghambat kerja pemerintah DKI Jakarta seperti yang ditudingkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut Nursyahbani, Tim Gubernur malah memperkuat fungsi legislatif, lewat mekanisme kontrol internal terhadap gubernur. Anggota DPR 2004-2009 itu mengingatkan tugas utama DPRD adalah menghasilkan kebijakan yang berguna bagi konstituen dan rakyat. "Bukan cuma menghakimi kesalahan eksekutif yang secara hukum harus mereka kontrol," ujar dia.

Sorotan terhadap tim *ad hoc* itu kembali menguat setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI meminta mereka dievaluasi. Mujiyono, Ketua Komisi Pemerintahan, menilai tim itu sudah keluar dari koridor dan menghambat kerja Gubernur dan peringkat daerah.

Tim Gubernur, Mujiyono menambahkan, dibentuk Joko Widodo—menjabat 2012-2014. Awalnya, tim itu bertujuan untuk menampung pegawai dengan golongan tinggi yang *non-job*. Kelompok kerja itu kemudian diperkuat dengan mendatangkan sejumlah profesional dari luar pemerintah DKI.

"Tapi, di era Anies, jumlah anggota dan anggarannya terlalu fantastis," kata dia.

Sejumlah nama besar masuk tim. Selain Nursyahbani, ada Bambang Widjojanto, mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi; Djohermansyah Djohan, mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri; dan pakar tata kota Marco Kusumawijaya.

Amin Subekti, mantan Direktur PLN, bergabung pada 2018.

Anggarannya terus meningkat dari Rp 1 miliar pada 2017 menjadi Rp 18,9 miliar tahun ini. Dewan akan mencoret rancangan anggaran daerah untuk Tim Gubernur dan menyaran mereka dibiayai oleh dana operasional DKI-1. ●

Naik Saban Tahun

Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan

Jumlah: 73 orang

Ketua: Amin Subekti

Bidang:

- Percepatan Pembangunan
- Pencegahan Korupsi
- Harmonisasi Regulasi
- Pengelolaan Pesisir
- Ekonomi dan Pembangunan

Gaji:

Ketua : Rp 51 juta

Ketua Bidang : Rp 41 juta

Anggota : antara Rp 8 juta sampai Rp 31 juta

Sumber Gaji (Rp miliar)

